

Manajemen Pendidikan Politik Menurut Martin Luther

Maya Djawa^{1*}, Nofriana Baun², Yakobus Adi Saingo³

^{1,2,3}Doktor Teologi, PAK, Magister PAK, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, NTT, Indonesia

Email: ¹mayaandre0803@gmail.com, ²novibaun@gmail.com, ³y.a.s.visi2050@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ^{1*}mayaandre0803@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi konsep manajemen pendidikan politik menurut Martin Luther dalam penataan manajemen pendidikan politik bagi orang Kristen masa kini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana peneliti mengumpulkan dan menginterpretasikan data dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi fenomena politik dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi Luther, manajemen pendidikan politik yang baik adalah manajemen pendidikan politik yang mampu memotivasi gereja menerapkan pendidikan politik non-violence. Konsep manajemen pendidikan politik Luther merupakan panduan dalam membangun kader pemimpin yang melayani dan menciptakan tatanan politik yang lebih adil.

Kata Kunci: Manajemen, Pendidikan, Politik, Luther, Kristen

Abstract—This study aims to explore the contribution of Martin Luther's political education management concept to the organization of political education management for Christians today. The research employs a literature review method with qualitative analysis, collecting and interpreting data from written sources such as books, journals, and relevant scholarly articles. Primary data were obtained through interviews with figures knowledgeable about political issues in Indonesia, particularly those involving Christians. Data collection techniques included observation of political phenomena, documentation, and interviews to gather comprehensive information. The findings indicate that the separation of political and religious authority emphasized by Luther is highly relevant for encouraging the church to focus on its mission as a spiritual institution, free from power conflicts. Luther's concepts of Sola Gratia and Sola Fide provide an ethical foundation for Christians to engage in politics, emphasizing that salvation depends on God's grace rather than good deeds. By integrating these principles, Christians can serve as agents of change, promoting social justice and community welfare, thereby positioning Luther's political education management concept as a guide in developing servant leaders and creating a fairer political order.

Keywords: Management, Education, Politic, Luther, Christian

1. PENDAHULUAN

Manajemen pendidikan politik bagi generasi muda penting dalam pengembangan nilai-nilai reformasi karena membantu generasi muda memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Dengan pemahaman yang baik tentang proses politik, kebijakan publik, dan pemerintahan, generasi muda dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang baik. Pendidikan politik memberikan pengetahuan tentang pentingnya kebebasan, keadilan, dan transparansi, yang merupakan pilar utama dari gerakan reformasi. Dengan ini, generasi muda dapat menjaga nilai-nilai reformasi tetap hidup dan relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, pendidikan politik mempersiapkan generasi muda untuk menjadi agen perubahan sosial yang kritis dan bertanggung jawab [1]. Mereka dapat mengawasi jalannya pemerintahan, menuntut akuntabilitas dari pemimpin, dan sebagainya. Dalam konteks reformasi, pendidikan politik membantu generasi muda memahami sejarah perjuangan bangsa serta tantangan-tantangan yang dihadapi, sehingga mereka memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperjuangkan perubahan yang lebih baik. Melalui pendidikan politik, generasi muda dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya partisipasi dalam menjaga demokrasi.

Carut marut politik di Indonesia saat ini terlihat dari banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara dan politisi, yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan [2]. Meskipun ada upaya pemberantasan korupsi, kasus-kasus besar seperti korupsi proyek infrastruktur dan anggaran daerah terus muncul, menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, politik transaksional dan budaya patronase yang kuat menyebabkan para elit politik lebih berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat [3]. Praktik "money politics" dalam pemilu juga menunjukkan bagaimana sistem politik dipenuhi manipulasi, yang mengurangi kualitas demokrasi [4].

Di sisi lain, polarisasi politik yang semakin tajam memecah belah masyarakat. Isu-isu sensitif seperti agama, etnisitas, dan identitas kerap digunakan oleh politisi untuk memperoleh dukungan, memperburuk ketegangan sosial [5]. Alih-alih menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa, para aktor politik sering kali memanfaatkan sentimen ini untuk keuntungan elektoral jangka pendek [6]. Ketidakstabilan ini menambah kompleksitas masalah politik di Indonesia, menciptakan suasana yang penuh ketidakpastian dan menghambat kemajuan pembangunan serta reformasi yang seharusnya diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa.

Manajemen pendidikan politik yang baik memiliki peran penting dalam mengatasi carut marut politik dengan menciptakan sistem pendidikan yang terstruktur dan berfokus pada nilai-nilai demokrasi, etika politik, dan tanggung

jawab sosial. Melalui pemahaman yang baik tentang pendidikan politik, generasi muda dapat memahami pentingnya integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam politik, sekaligus mengembangkan keterampilan kritis, analitis, dan partisipatif. Pendidikan politik yang efektif mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin berorientasi pada kepentingan publik dan memilih yang bijak, serta agen perubahan yang proaktif dalam mendorong reformasi demi menciptakan sistem politik yang bersih dan adil.

Pada satu sisi, Gregorius Widiartana dalam penelitiannya menekankan upaya pemberantasan korupsi adalah dengan melakukan pencegahan korupsi yang dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan antikorupsi, khususnya bagi pelajar di tingkat pendidikan dasar [7]. Selanjutnya, Gusti Kadek Sintia Dewi dalam artikelnya menemukan bahwa Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara pencegahan perilaku korupsi yang dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada seluruh individu termasuk siswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa [8]. Meskipun demikian, perilaku tersebut tetap mewarnai konteks politik di Indonesia, termasuk dalam konteks berpolitik orang Kristen. Namun di sisi lain, sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dunia yang hidup dalam satu polis yang sama, maka kita tidak boleh alergi terhadap politik [9].

Pada abad ke-16, Martin Luther berupaya menata ulang sistem politik melalui gerakan Reformasi yang dipelopori olehnya, yang tidak hanya mengguncang dunia gereja tetapi juga sistem politik di Eropa. Kekuasaan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan sehingga terjadi korupsi di antara para pemimpin gereja. Luther menolak kekuasaan absolut Gereja Katolik atas kehidupan spiritual dan politik, menekankan prinsip “sola scriptura” yang mengedepankan otoritas Alkitab di atas otoritas gereja. Luther memelopori munculnya ide-ide tentang kebebasan individu dan pemisahan kekuasaan gereja dan negara. Luther juga mempengaruhi perkembangan nasionalisme dan memberi dorongan bagi raja-raja dan penguasa lokal untuk menuntut lebih banyak otonomi dari kekuasaan gereja, yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam tatanan politik dan agama di Eropa. Sebagai seorang pengajar di Universitas Wittenberg, pemikiran Luther memengaruhi pemikiran mahasiswanya. Pemikirannya membuka jalan bagi pergeseran kekuasaan dari institusi keagamaan menuju pemerintahan sekuler yang lebih berorientasi pada kebebasan politik yang memengaruhi pemuda-pemudi pada masanya di Wittenberg [10]. Luther memberikan landasan bagi pola pendidikan politik generasi muda pada masanya.

Karena itu, tujuan penelitian ini adalah menemukan sejauhmana manajemen pendidikan politik Martin Luther dapat berkontribusi bagi penataan manajemen pendidikan politik bagi generasi muda pada masa kini?

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah terkait dengan konsep pendidikan politik menurut Martin Luther dan konteks perpolitikan di Indonesia saat ini.

2.2 Pendekatan Penelitian

Setelah itu, peneliti menganalisisnya secara kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial atau perilaku manusia dalam berpolitik baik pada masa Reformasi abad ke-16 maupun pada masa sekarang melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, melalui observasi dan dokumentasi.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Pertama, teknik observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena politik di Indonesia yang melibatkan orang Kristen. Hal ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami situasi dan konteks perpolitikan secara nyata serta mendokumentasikan fenomena yang terjadi secara akurat. Kedua, dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data tertulis seperti catatan, buku, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang relevan, guna mendapatkan data historis dan referensi yang mendukung penelitian [11].

2.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi: pertama, deskripsi, yaitu melukiskan objek secara detail untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai subjek yang diteliti, sehingga pembaca dapat memahami dengan baik setiap aspeknya. Kedua, eksposisi, yang bertujuan menjelaskan objek secara singkat, padat, dan langsung, tanpa berbelit-belit, sehingga pembaca dapat dengan mudah menangkap inti dari penjelasan tersebut. Ketiga, narasi, di mana penulis menggambarkan suatu peristiwa atau situasi secara kronologis dan dengan cara yang hidup, memungkinkan pembaca merasakan seolah-olah mereka mengalami peristiwa tersebut sendiri. Dan keempat, argumentasi, yang menyajikan bukti atau alasan logis untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan, serta bertujuan mempengaruhi atau meyakinkan pembaca terhadap sudut pandang atau kesimpulan tertentu [12].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Reformasi Abad ke-16 dan Martin Luther

Reformasi gereja merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah barat selain renaissance. Renaissance dan reformasi gereja adalah dua peristiwa reformasi besar di bidang pemikiran dan agama yang telah mengantarkan dunia Barat pada transformasi kehidupan masyarakat di Eropa Barat. Martin Luther adalah salah satu tokoh dalam sejarah gereja, dan dalam juga sejarah intelektual, politik dan sosial di Eropa, khususnya di Jerman [13]. Menurut McDonald meskipun Luther seorang agamawan dan bukan pemikir politik, percikan-percikan pemikirannya bisa dikatakan bernuansa politis, karena Luther melakukan reformasi pada struktur-struktur kekuasaan lembaga gereja, dan berimplikasi politis yakni upaya beberapa negara Eropa untuk melepaskan diri dari kekuasaan gereja pada masa itu [13].

Tujuan Luther sesungguhnya ingin meluruskan ajaran dan praktik gereja masa itu yang dianggapnya keliru setelah ia mempelajari Alkitab dan tradisi bapa-bapa gereja terutama Augustinus [1]. Nilai-nilai reformasi abad ke-16 yang dipelopori oleh Luther memiliki pengaruh besar pada perkembangan iman Kristen, terutama dalam hal teologi, pendidikan, dan tanggung jawab sosial, termasuk di dalamnya bidang politik.

3.2 Manajemen Pendidikan Politik Menurut Martin Luther

Manajemen pendidikan politik menurut Luther dapat dilihat dari pemikiran-pemikirannya berikut:

3.2.1 Dua Pemerintah, Dua Kuasa

Pada awal abad ke-16, gereja memiliki pengaruh politik yang sangat besar di seluruh Eropa. Paus memegang kekuasaan spiritual dan temporal, sering kali berperan sebagai *arbiter* dalam sengketa antar negara dan monarki. Gereja bukan hanya lembaga agama, tetapi juga kekuatan politik yang sangat kaya dan berkuasa. Paus sebagai pemimpin gereja tertinggi masa itu memiliki kekuasaan besar dalam kehidupan politik, dan hubungan antara tahta kekaisaran serta kepausan sangat erat [10].

Namun, terdapat banyak ketidakpuasan terhadap korupsi yang terjadi di dalam gereja, terutama terkait dengan praktik penjualan *indulgenti* (surat penghapusan siksa oleh Johann Tetzel). Bila seseorang ingin selamat melintasi *purgatorium* (api penyucian), maka ia harus banyak berbuat amal kebajikan bagi gereja dengan mewajibkan setiap orang untuk membeli surat *indulgenti*. Menurut pemahaman gereja pada saat itu, keselamatan bukan hanya oleh anugerah Tuhan tetapi oleh usaha manusia melalui amal manusia yang difasilitasi oleh gereja [10]. Hal inilah yang mendorong Luther melakukan reformasi.

Menurut Luther, teologi dan praktik gereja itu tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab. Baginya, keselamatan tidak ditentukan oleh gereja, dan bahwa untuk memperolehnya manusia tidak harus melakukan amal atau berbuat baik. Itu sama saja dengan praktik aliran *pelagian* (pada masa Augustinus) yang menekankan bahwa keselamatan ditentukan oleh manusia. Ini adalah suatu ajaran yang keliru [15].

Pemimpin agama pada saat itu menggunakan otoritas untuk menciptakan sebuah ajaran dan praktik demi melegitimasi motif melanggengkan dan memamerkan kekuasaan religius dan politiknya. Bertepatan dengan saat itu, gereja membutuhkan dana untuk membiayai perang salib dan pembangunan katedral Santo Petrus. Mereka berupaya mencari uang dari upeti dan pajak yang diterima dari wilayah-wilayah di bawah kekuasaan kepausan. Di sini agama pada masa itu digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan sepihak [1].

Dalam sebuah khotbah terkenal pada Agustus 1520 yang berjudul surat terbuka untuk para bangsawan Kristen, Luther menyerukan penghancuran “tiga dinding” para “romanistik.” Dinding pertama adalah mengenai perlunya menghancurkan klaim kaum gereja atas penguasa sekuler, menurutnya kekuasaan pemimpin gereja masa itu tidaklah universal, sebab itu pemimpin gereja harus mengakui kekuasaan para pangeran atau penguasa sekuler suatu negara yang memiliki prinsip-prinsip kenegaraan yang berdasarkan nasionalisme. Karena gagasannya ini kemudian Luther mendapat dukungan politik yang kuat dari kalangan penguasa dan bangsawan [13].

Dalam hal ini, Luther membedakan antara pemerintahan “spiritual” dan “duniawi” atas masyarakat. Pemerintahan spiritual dari Tuhan diberlakukan melalui Firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Sedangkan pemerintahan duniawi dari Tuhan diberlakukan melalui raja-raja, pangeran-pangeran, dan hakim-hakim, dengan mempergunakan pedang dan hukum negara. Raja-raja, pangeran-pangeran, dan hakim-hakim dalam perannya meraka sedang mengerjakan suatu pekerjaan ilahi (Rm. 13:1-7; 1 Pet. 2: 13-14) dengan menetapkan keteraturan untuk tujuan mempertahankan perdamaian dan menekan dosa [12].

3.2.2 Sola Gratia, Sola Fide, dan Solus Christos

Sebelum reformasi, Luther belajar dan mengajar tentang konsep perjanjian antara Tuhan dan manusia, di mana telah membuat suatu kerangka kerja yang di dalamnya usaha manusia yang secara relatif kecil menghasilkan imbalan ilahi yang besar yang tidak sepadan. Namun suatu usaha manusia yang tertentu dibutuhkan untuk menempatkan Allah berkewajiban memberikan imbalan kepada orang berdosa dengan anugerah [12]. Di sini, amal dan perbuatan seseoranglah yang memengaruhi Tuhan sehingga Tuhan memberikan anugerah keselamatan-Nya kepada manusia.

Akan tetapi, Luther mengalami perubahan pemikiran (terobosan teologi) melalui kitab Mazmur dan Roma. Menurut Luther, manusia diselamatkan oleh Anugerah Tuhan saja (*Sola Gratia*) melalui iman (*Sola Fide*), bukan

melalui perbuatan baik. Anugerah itu adalah pengampunan yang membebaskan (penebusan). Allah mengenakan kepada kita kebenaran Kristus dan karena itu memandang kita selaku orang-orang benar. Hukumannya atas kesalahan kita maupun belaskasihannya atas kebinasaan kita telah ditunjukkannya dalam salib Kristus. Di situ, Kristus sendirilah yang menanggung segala sesuatu (Solus Christos). Maka segala perhitungan dan amalan manusia menjadi hilang. Manusia hanya dapat lagi beriman, berarti percaya kepada Firman (Yesus Kristus) yang membebaskan itu. Tuhan tidak menuntut melainkan menganugerahkan [1].

Ada 3 (tiga) penekanan iman menurut Luther:

- Iman mempunyai rujukan yang pribadi/personal daripada rujukan yang murni historis. Iman yang menyelamatkan menyangkut kepercayaan dan keyakinan yang sungguh bahwa Kristus telah dilahirkan *pro nobis*, dilahirkan untuk kita secara pribadi, dan telah menggenapi untuk kita pekerjaan itu (Solus Christos).
- Iman menyangkut kepercayaan pada janji-janji Tuhan. Iman adalah kepasraan (fiducia). Ibarat seseorang yang hendak menyeberangi lautan, ketika takut, maka ia tidak dapat menyeberangi lautan. Ia hanya dapat melewatinya jika ia mempercayai dan menaiki kapal sekalipun ia takut. Jadi iman bukan sekedar percaya bahwa sesuatu itu adalah benar, namun juga siap untuk bertindak atas dasar kepercayaan itu dan menyandarkan diri padanya. Iman Kristen berarti percaya kepada Kristus tanpa ragu akan kebenaran janji-janji Tuhan dan bertindak di dalam Kristus Tuhan.
- Iman mempersatukan orang percaya dengan Kristus. Ibarat cincin perkawinan yang merujuk pada komitmen bersama dan kesatuan antara Kristus dan orang percaya.

Luther menekankan bahwa membenaran oleh iman tidak berarti bahwa orang berdosa itu dibenarkan karena ia percaya atau oleh imannya, melainkan karena Allah sesungguhnya telah memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk membenaran sehingga semua hal yang perlu dikerjakan oleh orang berdosa diterimanya. Dengan kata lain, membenaran orang berdosa didasarkan atas anugerah dan diterima melalui iman. Orang percaya melakukan perbuatan baik sebagai tindakan pengucapan syukur karena Allah telah mengampuninya, bukan dalam usaha untuk mencapai Tuhan supaya mengampuni dirinya sebagai faktor yang paling utama [12].

3.3 Kontribusi Manajemen Pendidikan Politik Menurut Martin Luther bagi Penataan Manajemen Pendidikan Politik bagi Orang Kristen Masa Kini

3.3.1 Kontribusi bagi Pemerintahan Agama dan Pemerintahan Politik

Implikasi dari pemikirannya ini Luther menuntut dibedakannya antara “otoritas politik” dengan “otoritas agama,” karena konteks saat itu adalah otoritas agama yang menyalahgunakan kewenangannya dan mencampuradukkan antara ranah gereja dan ranah politik untuk kepentingan politik sepihak. Konsekuensinya pemimpin gereja saat itu dituntut agar mengakui otoritas politik penguasa serta tidak mencampuradukkan dengan otoritas agama.

Pemikiran Luther yang memisahkan “otoritas politik” dan “otoritas agama” memberikan dasar penting bagi gereja agar tetap fokus pada misinya yakni misi spiritual dan moral yang berkaitan dengan politik keberpihakan pada aspek-aspek sosial tanpa terjebak dalam konflik kekuasaan politik. Pemikiran Yewangoe dalam Bukunya “Hidup dari Pengharapan,” kiranya membantu memahami pemikiran Luther, bahwa dalam Perjanjian Baru, ada dua istilah digunakan untuk menggambarkan kekuasaan: “*exousia*” dan “*dunamis*.” *Exousia* mewakili kekuasaan yang diberikan dari sumber eksternal, seperti oleh manusia atau oleh yang dianggap sebagai dewa. *Dunamis*, sebaliknya, adalah kekuasaan internal yang mencari dan meningkatkan potensi mereka yang dilayani. Kedua jenis kekuasaan tersebut perlu diseimbangkan. Namun, ada kalanya orang cenderung hanya fokus pada *exousia*, yakni: berkeinginan untuk dilayani dibandingkan melayani orang lain. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dievaluasi berdasarkan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Kristus [15].

Dalam konteks Indonesia, termasuk Provinsi NTT yang majemuk dengan beragam suku dan agama, maka pemisahan ini juga penting. Namun fokus politik Luther yang lebih pada sistem monarkhi juga memiliki kelemahan. Sistem Monarkhi yang pada akhirnya menekankan konsep politik kekuasaan yang superioritas juga tidak menjamin kekuasaan itu berpihak pada umat atau rakyat. Misalnya, tindakan Luther mendukung pembungkaman pemberontakan petani oleh para pangeran justru menantang pemikirannya tentang kebebasan Kristen [1].

Dalam konteks politik saat ini, trennya bukan lagi gereja yang merambah ranah politik kekuasaan, tetapi politik kekuasaan juga mulai merambah ke gereja. Bukan berarti gereja harus alergi terhadap politik. Bukahkan politik berasal dari kata *polis* yang berarti kota dan bahwa Tuhan sendiri telah memaklumkan kita untuk selalu mengupayakan kota yang damai dan sejahtera (Yer. 29:7). Jadi politik yang dimaksudkan oleh gereja adalah suatu kemampuan untuk hidup bersama di dalam *polis* (baca: negara, bangsa, hidup), mereka tidak bisa mengisolasi diri sendiri, hidup dalam *gettho* sendiri [16]. Dengan demikian, maka kita sebagai orang Kristen memiliki tanggungjawab yang besar dalam bidang politik. Karena peliknya persoalan politik yang selalu diidentikkan dengan kekuasaan, bukan berarti bahwa pemimpin gereja juga tutup mata dengan carut marutnya persoalan politik kekuasaan. Justru di sinilah memungkinkan gereja seperti halnya Luther menata manajemen politiknya dengan berperan sebagai suara moral namun tetap kritis terhadap kebijakan publik, menjaga integritasnya sambil tetap mendorong etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan politik. Jadi gereja dan generasi muda perlu lebih mengembangkan pendidikan politik yang melayani dari pada yang dilayani.

3.3.2 Kontribusi bagi Manajemen Pendidikan Politik yang Berintegritas

Pemikiran Luther mengenai pembenaran melalui iman (Sola Fide) dan anugerah Tuhan (Sola Gratia) memberikan kontribusi signifikan bagi manajemen pendidikan politik yang melibatkan orang Kristen dalam penataan politik yang berintegritas. Hal ini menekankan pentingnya keadilan dan etika dalam pengambilan keputusan. Dengan menyadari bahwa keselamatan dan pembenaran tidak bergantung pada perbuatan baik, orang Kristen dapat berfungsi sebagai suara moral yang mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kasih, dan pengampunan, tanpa terjebak dalam ambisi kekuasaan. Dengan kata lain, jika orang pada hakikatnya hidup mentaati perintah Tuhan, maka dengan sendirinya memotivasinya untuk melakukan perbuatan yang baik. Selama ini, orang berupaya menata perpolitikan yang berpihak pada aspek sosial dengan mengedepankan perbuatan baik. Namun, manajemen perpolitikan itu penting dilandasi dengan hidup takut akan Tuhan. Pendekatan ini memungkinkan orang Kristen untuk mendukung kebijakan publik yang merefleksikan kasih Tuhan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pemimpin politik untuk bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang Kristen yang telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan, dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang menekankan keadilan bagi semua, dan terus menyuarakan bahwa anugerah dan kasih karunia Tuhan adalah landasan utama bagi semua tindakan dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Manajemen pendidikan politik yang berintegritas yang ditawarkan Luther menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya melayani, tetapi juga bersahabat. Dalam model kepemimpinan ini, *servant leadership* menempatkan kebutuhan dan kepentingan rakyat di atas segalanya [18], sementara *friend leadership* seperti yang dilakukan oleh Yesus bersama para murid-Nya menekankan hubungan yang erat dan saling mendukung antara pemimpin dan yang dipimpin [19]. Pemimpin yang berintegritas membangun kepercayaan melalui keteladanan, keterbukaan, dan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat. Pendidikan politik dengan pendekatan ini tidak hanya fokus pada pengembangan pemahaman atau pengetahuan politik, tetapi juga menciptakan pemimpin yang empati, jujur, dan mampu membina hubungan yang konstruktif serta mendukung partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat, sehingga tercipta tatanan politik yang lebih sehat dan adil.

4. KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa manajemen pendidikan politik Martin Luther dapat berkontribusi bagi penataan manajemen pendidikan politik bagi generasi muda pada masa kini, namun terbatas pada beberapa aspek. Pertama, manajemen pendidikan politik Luther memotivasi generasi muda untuk berperan sebagai suara moral yang kritis terhadap kebijakan publik, mengedepankan nilai-nilai keadilan, dan kasih dalam kehidupan politik. Kedua, manajemen pendidikan politik Luther menawarkan bagi generasi muda masa kini yakni suatu model kepemimpinan yang berintegritas dalam mewujudkan kehidupan politik yang sehat yakni melayani dan bersahabat dengan masyarakat yang dipimpinnya.

REFERENCES

- [1] R. Riyanti, A. Luthfi, and D. Rohana, "Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik," *Themis J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 26–31, Aug. 2023, doi: 10.70437/themis.v1i1.330.
- [2] D. Martiningsih, "PERAN MASYARAKAT MADANI MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT: PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME," *J. Pusaka*, vol. 5, no. 2, pp. 22–47, 2018, doi: <https://doi.org/10.35897/ps.v5i2.121>.
- [3] M. N. C. Nugroho, "Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 20201," *Polit. J. Ilmu Polit.*, vol. 13, no. 1, pp. 167–184, 2022.
- [4] A. S. N. Y. E. S. M. C. B. S. D. Hariyanti, "Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap praktek Kejahatan Money Politic pada Pemilihan Umum Di Indonesia," *J. Ilmu Huku*, vol. 1, no. 3, pp. 10–16, 2024, doi: <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i3.978>.
- [5] C.-Y. Hoon, "Between Evangelism and Multiculturalism: The Dynamics of Protestant Christianity in Indonesia," *Soc. Compass*, vol. 60, no. 4, 2013.
- [6] M. I. A. S. M. B. A.-A. M. Afdillah, *POLITIK LOKAL DAN KONFLIK KEAGAMAAN: Pilkada dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies, 2015.
- [7] G. Widiartana, "URGensi PENDIDIKAN ANTIKORUPSI TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENDIDIKAN DASAR," *J. Huk. Mimb. Justitia*, vol. 6, no. 2, pp. 173–189, 2020.
- [8] G. K. S. Dewi, "MENCEGAH DAN MEMBERANTAS POTENSI ADANYA KORUPSI MELALUI PEMBERIAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LEMBAGA PENDIDIKAN," *J. Ilmu Huk. Sui Generis*, vol. 2, no. 4, 2022, doi: <https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1783>.
- [9] A. A. Yewangoe, *Hidup dari Pengharapan-Mempertanggungjawabkan Pengharapan di Tengah Masyarakat Majemuk Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- [10] A. M. L. Batlajeryl, *Kembali ke Masa Lalu, Solusi Masa Kini: Belajar dari Cara Luther dan Calvin Membarui Gereja yang Berdampak pada Masyarakat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023.
- [11] Sugiyono, *Metode Kuantitatif, R dan D*. Bandung: Alfabet, 2017.
- [12] G. Keraf, *Eksposisi Lanjutan Komposisi II*. Jakarta: Grasindo, 1995.
- [13] A. E. McGrath, *Sejarah Pemikiran Reformasi*. Kupang: BPK Gunung Mulia, 2019.



- [14] G. Argenti, "Reformasi Gereja: Dampak Sosial Politiknya," *Pasca Sarj. Ilmu Polit. Univ. Nas.*, pp. 1–10, 2011.
- [15] A. E. McGrath, *Christian Theology: An Introduction*, Sixth Edit. United Kingdom: Wiley Blackwell, 2017.
- [16] A. A. Yewangoe, *Hidup dari Pengharapan: Mempertanggungjawabkan Pengharapan di Tengah Masyarakat Majemuk Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- [17] A. A. Yewangoe, *Tidak Ada Penumpang Gelap: Warga Gereja, Warga Bangsa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- [18] D. R. P. Saragih, "IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN KRISTEN," *J. Ilm. Musik dan Agama*, 2019.
- [19] M. Mau, "PERAN GEMBALA JEMAAT SEBAGAI PEMIMPIN DALAM MENINGKATKAN PERSAHABATAN DENGAN SEMUA ORANG," *SAINT PAUL 'S Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 54–67, Sep. 2022, doi: 10.56194/spr.v2i1.19.